



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WAWAN JUSWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
3. NHK : **765707**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.236.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.680.000.000
2. Tanah Seluas 454 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 551.000.000
3. Tanah Seluas 1060 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.155.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/145 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.520.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 360.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 Q Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.454.111.420
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	10.095.611.420
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.095.611.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.